



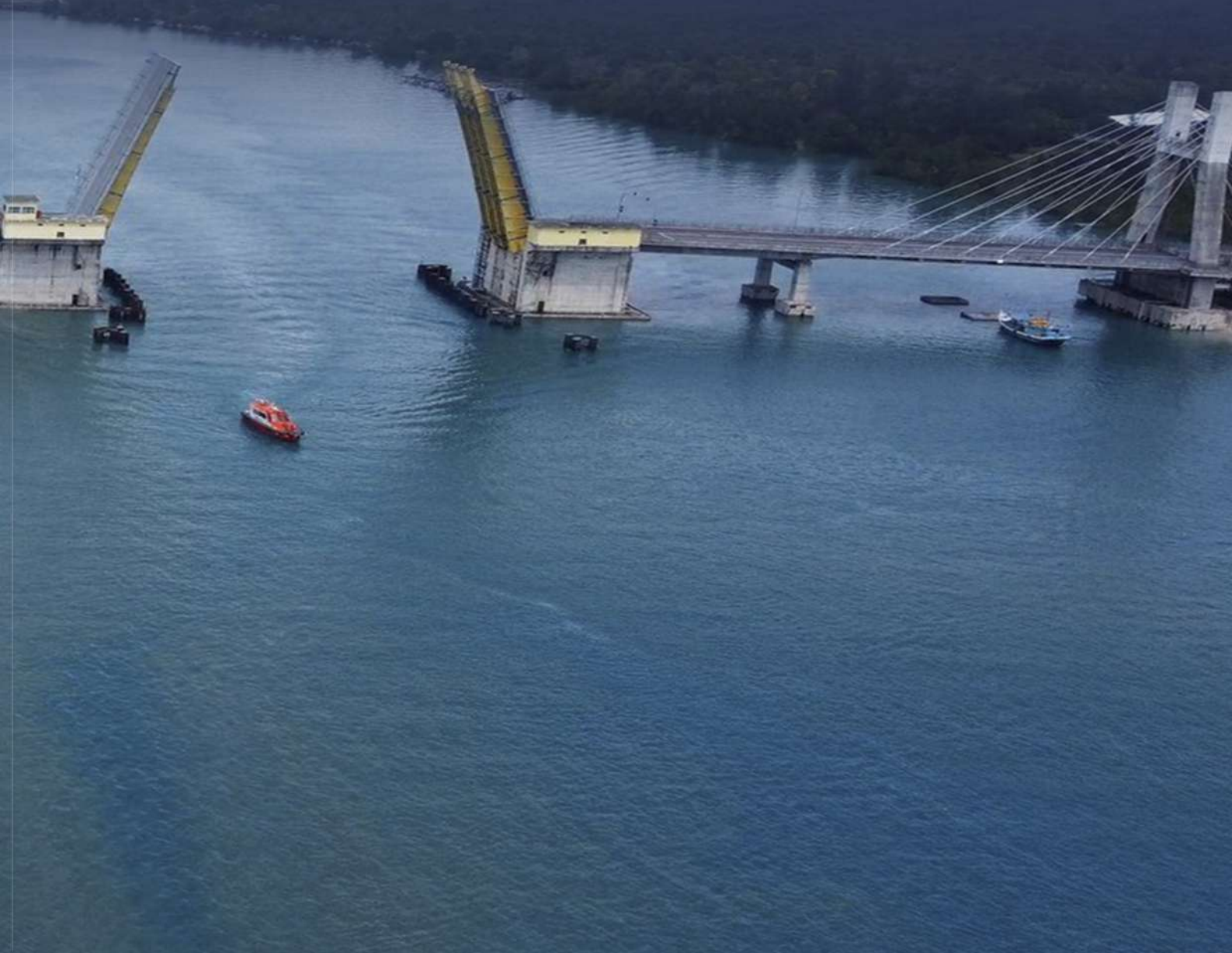
Kota Pangkal Pinang

P-RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2025

**“Pemerataan Kesejahteraan dan
Daya Saing Sumber Daya Manusia”**





WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terarah dan terencana guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah serta penyesuaian dengan pertimbangan keadaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan perubahan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman kepada RPD Tahun 2025-2026, RKP Tahun 2025, serta Perubahan RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2025.

BAB III SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD

Pasal 4

- (1) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan I tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - f. penutup.

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan RKPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 224), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 27 Mei 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

M. UNU IBNU DIN

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 27 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,


MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025 NOMOR 277



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

Tabel IV.6
Keselarasn Prioritas Nasional dengan Program Pembangunan Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Kesehatan	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat	Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86.940.042.780	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	524.458.500	Dinas Kesehatan
	Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan Daerah		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	385.919.000	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	161.635.000	Dinas Kesehatan
			Program Pengelolaan Pendidikan	69.586.280.270	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	33.361.700	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	74.600.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kurikulum	130.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kebudayaan	712.723.796	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah	77.436.696	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	181.063.242	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Sub Total	158.807.520.984	
Program Makan Bergizi Gratis (Mbg)	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan Dan	Peningkatan Akses Dan Kualitas	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	385.919.000	Dinas Kesehatan



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat	Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	161.635.000	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86.940.042.780	Dinas Kesehatan
	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	Peningkatan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	244.371.520	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	849.602.064	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	76.300.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Penyuluhan Pertanian	281.856.784	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	186.675.176	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	272.108.968	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4.995.000	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Sub Total	89.403.506.292	
Pencegahan Stunting Dan Kemiskinan Ekstrem	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	Peningkatan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	244.371.520	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	849.602.064	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	65.881.588	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Penanganan Kerawanan Pangan	21.271.696	Dinas Pangan Dan Pertanian



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.086.782.032	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	297.375.088	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	30.000.000	Dinas Sosial
	Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Serta Daya Saing Masyarakat	Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	86.940.042.780	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	161.635.000	Dinas Kesehatan
		Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan Daerah	Program Pengelolaan Pendidikan	69.586.280.270	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Meningkatkan Pemerataan Penyediaan Infrastruktur Dasar Dan Ketaatan Pada Tata Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.197.534.950	Dinas Pupr
			Program Pengembangan Perumahan	1.227.180.400	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	494.559.103	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	463.091.620	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan Pemberdayaan Dan Kapasitas Umkm	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	42.014.000	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
			Program Pengembangan Umkm	42.000.000	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	225.990.088	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
	Peningkatan Kompetensi Dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Peningkatan Keterampilan Dan Keahlian Angkatan Kerja, Khususnya Dalam Teknologi, Informasi Dan Komunikasi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	275.160.000	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	239.405.624	Dinas Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial	136.911.696	Dinas Tenaga Kerja
	Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender	Meningkatkan Perlindungan, Kesetaraan, Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1.418.830.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Kb
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1.479.541.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Kb
			Sub Total	176.525.460.519	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
Pengendalian Inflasi Di Daerah	Akselerasi Reformasi Birokrasi Dan Demokrasi Daerah	Peningkatan Transparansi Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Terkendalinya Inflasi Daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.678.508.072	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	67.614.392	Dinas Pangan Dan Pertanian
	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	Perbaikan Dan Pemerataan Pangan Dan Gizi Masyarakat	Program Penanganan Kerawanan Pangan	21.271.696	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	25.954.156	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian *Budidaya (Demplot) Cabai Merah	281.856.784	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4.995.000	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	193.130.176	Dinas Pangan Dan Pertanian
	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	225.990.088	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	244.371.520	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	849.602.064	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Sub Total	4.593.293.948	



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Terkendalnya Harga Barang Dan Tertatanya Infrastruktur Pusat Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.099.291.904	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	225.990.088	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	-	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	42.014.000	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
			Program Pengembangan Umkm	42.000.000	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	170.994.328	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	333.099.268	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
		Optimalisasi Peningkatan Daya Tarik Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	21.271.696	Dinas Pmptsp
			Program Promosi Penanaman Modal	187.108.928	Dinas Pmptsp
			Program Pelayanan Penanaman Modal	214.478.480	Dinas Pmptsp
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	129.230.000	Dinas Pmptsp



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	127.415.088	Dinas Pmptsp
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	810.224.024	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	488.025.944	Dinas Pariwisata
			Sub Total	3.891.143.748	
Dukungan Swasembada Pangan	Percepatan Penanganan Kemiskinan	Peningkatan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	244.371.520	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	849.602.064	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	76.300.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
			Program Penyuluhan Pertanian	281.856.784	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	186.675.176	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	272.108.968	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4.995.000	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	193.130.176	Dinas Pangan Dan Pertanian
		Perbaikan Dan Pemerataan Pangan Dan Gizi Masyarakat	Program Penanganan Kerawanan Pangan	21.271.696	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	67.614.392	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	25.954.156	Dinas Pangan Dan Pertanian



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
			Sub Total	2.223.879.932	
Pengembangan Industri Kerajinan Dan Memfasilitasi Dalam Mempromosikan Dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm)	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	42.014.000	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
			Program Pengembangan Umkm	42.000.000	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	170.994.328	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	333.099.268	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.099.291.904	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
		Peningkatan Kualitas Dan Kuantitatif Sdm Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	810.224.024	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	500.411.792	Dinas Pariwisata
			Sub Total	2.998.035.316	